

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pemaparan analisis diatas ialah Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang dianalisis dengan Nvivo 12 Plus secara umum dari ke empat proses tadi dapat dilihat Corporate 9.05%, Pemerintah 7.62%, Partai Politik 0.32% dan Konsultan politik 0%. Tetapi jika dipetakan dalam setiap proses dapat dilihat *pertama* : pada proses perencanaan aktor yang terlibat Corporate sebesar 7.69%, Pemerintah 7.33%, Partai Politik :0.37% dan Konsultan politik : 0%, *kedua* : pada proses Penawaran aktor yang terlibat Corporate 9.5%, Pemerintah 7.44%, Partai Politik 0.41% dan Konsultan politik 0%, *ketiga* : aktor yang terlibat Corporate 16.67%, Pemerintah 5.56%, Konsultan politik 0% dan Partai Politik 0% dan *keempat* : aktor yang terlibat Corporate 10.31%, Pemerintah 9.28%, Konsultan politik 0%, dan Partai Politik 0% dan pada Konektivitas Cluster setiap proses memiliki keterkaitan satu sama lain dengan case pemerintah, konsultan dan partai politik, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan case konsultan politik.

Pada Jaringan Visualisasi Korupsi, yang didapatkan dari Hasil Analisis 38 journal scopus bercitasi dapat disimpulkan bagaimana korupsi pada suap proses pengadaan, dapat terlihat pengadaan menjadi obyek yang seksi untuk di korupsi dengan cara memberi suap kepada pejabat lelang dalam hal ini (Pemerintah) yang dilakukan oleh Perusahaan – Perusahaan dalam hal ini (*Corporation*) hal ini menunjukkan bahwa kedua aktor ini menjadi dominan dalam kasus korupsi baik dalam proses perencanaan, Penawaran, Evaluasi Penawaran ataupun Pelaksanaan dan Evaluasi.